

SKRIPSI

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM**

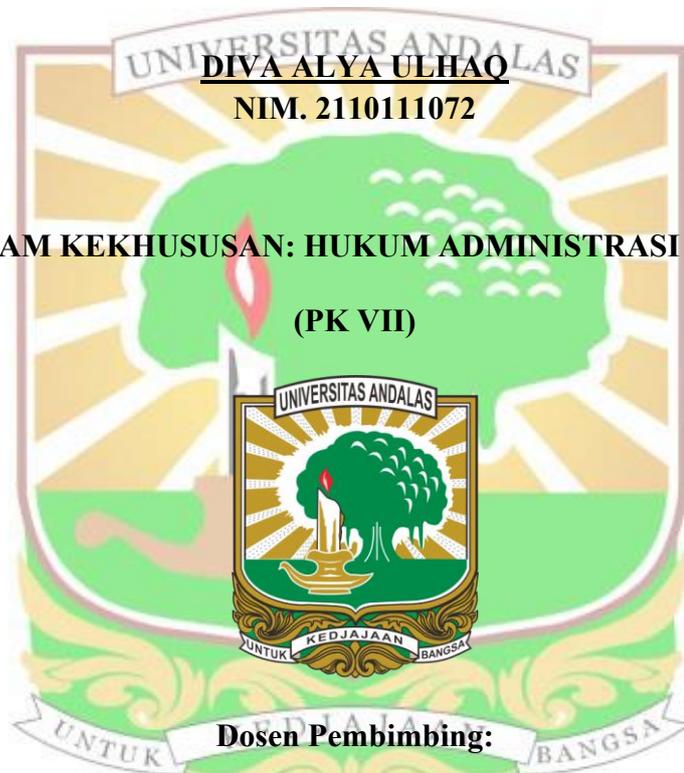
*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH :

DIVA ALYA ULHAQ

NIM. 2110111072

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VII)**



Dosen Pembimbing:

Dr. Yuslim, S.H., M.H

Hendria Fithrina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No. Reg : 29/PK-VII/IV/2025

ABSTRAK

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen resmi yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan realisasi pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran. Dasar hukum Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam adalah Qanun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam. Dalam hal ini kota Subulussalam masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan APBD kota Subulussalam belum mencapai optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Subulussalam dan hambatan dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Subulussalam. Dalam penelitian ini mencakup dua pokok permasalahan yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Subulussalam? 2) Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Subulussalam?. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis empiris. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBD kota Subulussalam menggunakan pedoman umum sebagai acuan. Namun realisasi anggaran belum optimal. 2) Hambatan dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban APBD kota Subulussalam yaitu kesulitan dalam pencapaian target waktu, memiliki masalah dalam pembahasan dan belum memenuhi target pada pendapatan daerah dalam laporan realisasi anggaran.

Kata Kunci : *Laporan Pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah*

